

Peran Perbankan Syariah Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Riil

Nabila Nur Khairina

Politeknik Negeri Bandung

nabilanurk@gmail.com

Mochamad Edman Syarief

Politeknik Negeri Bandung

edsykemp@gmail.com

Setiawan

Politeknik Negeri Bandung

setiawan@polban.ac.id

Abstract

This paper aims to examine the labor absorption in the real sector, including three essential determinants, namely Non-Performing Financing, Third Party Funds, and Profit-Sharing Financing. The object of this research is the Islamic Commercial Bank in Indonesia. Data analysis techniques in this study use path analysis. The results showed that (i) Profit Sharing Financing and Non-Performing Financing directly had a positive and significant effect on the Real Sector Labor Absorption variable; (ii) Third Party Funds are insignificant to the variable Real Sector Labor Absorption; (iv) Third Party Funds have a positive and significant effect on the variable Real Sector Labor Absorption through Profit-Sharing Financing; and (v) Non-Performing Financing is not significant to the Real Sector Labor Absorption variable through Profit-Sharing Financing.

Keywords: Profit-Sharing Financing, Third Party Funds, *Non Performing Financing*, Real Sector Labor Absorption.

Pendahuluan

Salah satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja (Solow, 1956; Swan, 1956). Agar terjadi penyerapan tenaga kerja sektor riil sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, dibutuhkan peran sektor keuangan, karena hambatan pada kurangnya lapangan pekerjaan disebabkan oleh minimnya peran sektor keuangan yang tidak mengarah pada sektor-sektor produktif (Manap, 2018). Seperti kita tahu bahwa sektor keuangan yang efektif merupakan hal utama dalam menunjang pertumbuhan ekonomi (Setyowati dkk., 2019). Menurut Burkett (2012), untuk memaksimalkan penciptaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja pada sektor riil diperlukan peran investasi dari swasta maupun pemerintah, karena investasi dapat berupa modal menciptakan kemungkinan penciptaan lapangan kerja. Adanya hambatan pada

penyerapan tenaga kerja pada sektor riil tersebut sejalan dengan fenomena rendahnya pembiayaan bagi hasil yang disalurkan ke sektor riil pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia

Bank syariah, seperti bank pada umumnya selaku lembaga intermediasi memiliki peran untuk menyalurkan dana, maka seharusnya dapat menyalurkan pembiayaan kepada sektor riil. Sehingga dapat mengatasi hambatan modal dalam memperluas lapangan pekerjaan pada sektor riil. Dengan segala potensi yang dimiliki oleh bank syariah terutama jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia (Suhartanto, dkk., 2018; Suhartanto, dkk., 2019). Selain itu, bank syariah memiliki akad produktif berlandaskan sistem bagi hasil yang terdiri atas akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang merupakan *core product* pada bank syariah. Pembiayaan bagi hasil terutama *musyarakah* dengan pembiayaan jangka panjang proyek-proyek produktif, mendukung jangka panjang pembangunan ekonomi dan keuangan (Dar dan Presley, 2000).

Shaikh (2017) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* dapat digunakan untuk mendanai usaha mikro dan usaha mikro ini akan memperkerjakan masyarakat miskin yang memiliki keterampilan terkait. Hasil penelitian tersebut mempertegas bahwa bank syariah dengan menyalurkan pembiayaan *mudharabah* akan membuka peluang kerja (memperluas lapangan pekerjaan) sehingga dapat tercipta penyerapan tenaga kerja. Senada dengan hal tersebut, Rama (2013) menyatakan bahwa perbankan syariah diinginkan agar tetap konsisten dalam membiayai sektor riil dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menyalurkan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pola pembiayaan tersebut secara ekonomi memberikan kontribusi dengan mengentaskan pengangguran dan kemiskinan serta memajukan pertumbuhan ekonomi riil. Walau di sisi lain, terdapat perbedaan pandangan seperti yang diungkap Yusof & Wilson (2005) yang menyimpulkan bahwa sistem bank non-riba (bagi hasil) tidak lebih unggul dan stabil dibandingkan dengan bank yang menggunakan riba (*interest based banking system*) dalam hal pencapaian kesinambungan pertumbuhan riil ekonomi dan penurunan pengangguran,

Dengan adanya kesenjangan antara teori dan kenyataan, serta ada *researchgap*, membuat peneliti tertarik untuk mencari tahu lebih jauh variabel-variabel yang memengaruhi pembiayaan bagi hasil, dan pengaruh pembiayaan bagi hasil tersebut terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor riil. Dana Pihak

Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) adalah variabel yang dipilih, karena kedua variabel tersebut adalah faktor-faktor yang memengaruhi banyaknya pembiayaan bagi hasil yang disalurkan ke sektor riil. Sehingga, dirumuskan masalah apakah secara langsung Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor riil, dan apakah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor riil melalui pembiayaan bagi hasil.

Tinjauan Pustaka

Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Riil

Penyerapan tenaga kerja dapat didukung oleh faktor eksternal dan faktor internal (Ridha, 2011). Faktor internal dari industri yang meliputi tingkat upah, produktivitas tenaga kerja dan modal. Tenaga kerja adalah salah satu sumber daya yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi suatu negara jika dilihat dari sudut pandang positif. Namun, apabila tidak terjadi penyerapan tenaga kerja secara penuh maka akan tercipta pengangguran (Soleh, 2017).

Perluasan kesempatan kerja atau menyediakan lapangan perkerjaan merupakan usaha mengatasi permasalahan mengenai pengangguran. Hal tersebut dilakukan dengan cara memajukan sektor-sektor yang dapat menyerap tenaga kerja. Sektor riil adalah sektor penyerap tenaga kerja terbesar, karena sektor riil merupakan sektor sesungguhnya, dan menyentuh langsung kegiatan ekonomi di masyarakat dan dijadikan tolak ukur dalam mengetahui pertumbuhan ekonomi (Cahyaningrum, 2017). Cara agar dapat memperluas kesempatan kerja yaitu dengan mengembangkan industri padat karya (Adil, 2017). Industri yang padat karya contohnya Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), karena UMKM berperan penting dalam hal menyerap tenaga kerja (Utari, 2014).

Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Riil atau kemudian disingkat TKSR dapat diwujudkan melalui adanya investasi swasta ataupun pemerintah. Investasi dapat berupa modal, dan modal baru dapat dimanfaatkan dalam menciptakan kemungkinan bagi masyarakat melalui siklus positif dari kegiatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (Burkett, 2012).

Pembiayaan Bagi Hasil

Menurut Pasal 1 butir (25) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bahwa yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istisna*, pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa. Pembiayaan bagi hasil yang selanjutnya disingkat PBH terdiri dari 2 (dua) akad yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* yang merupakan *main core* dari perbankan syariah. Dalam kaitannya dengan pembiayaan, bagi hasil berdiri atas dasar kerja sama antara bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola modal untuk dapat memperoleh keuntungan dan kemudian membagi keuntungan tersebut berdasar nisbah yang telah disepakati di awal (Supriyadi, 2003).

Dana Pihak Ketiga

Peran Dana Pihak Ketiga atau disingkat DPK dalam perbankan syariah menjadi sumber dana terbesar dan paling diandalkan bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya, dan bank harus menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan (Fitri, 2016; Setiawan, 2018). Menurut Susanty (2014), untuk membuat bank lebih agresif dalam menyalurkan pembiayaan maupun kredit kepada sektor produktif, maka bank harus meningkatkan penghimpunan DPK. Dari beberapa sumber dana hanya DPK yang mampu dipacu agar meningkatkan penyaluran pembiayaan apabila dibandingkan dengan sumber dana lain, atau bisa disimpulkan bahwa potensi pasar terbesar adalah DPK (Fitri, 2016). DPK mempunyai peran sangat besar dalam perbankan syariah untuk menyalurkan pembiayaan, sehingga apabila DPK maksimal, maka penyaluran pembiayaan pun akan maksimal, karena kemampuan bank dalam memobilisasi DPK dari masyarakat memengaruhi kemampuan bank untuk memperluas penyaluran pembiayaan (Rama, 2013).

Non Performing Financing

Rasio *Non Performing Financing* atau disingkat NPF memperlihatkan kualitas manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang disalurkan

oleh bank syariah, dan mencerminkan risiko pembiayaan (Hijriyani dan Setiawan, 2017). NPF harus selalu berada di bawah 5%, karena dalam ketentuan Bank Indonesia, apabila jumlah pembiayaan yang bermasalah maksimal 5% dari seluruh total pembiayaan yang diberikan menunjukkan kualitas pembiayaan berkualitas baik (Maidalena, 2014). Adanya aturan yang menetapkan besarnya NPF dikarenakan jika rasio NPF semakin tinggi, menunjukkan kualitas pembiayaan pada bank syariah semakin memburuk (Ihsan, 2013). Hal ini didukung oleh pendapat Oktaviani (2017) serta Hijriyani dan Setiawan, (2017) yang menyatakan bahwa bank dengan NPF yang tinggi dapat merusak fungsi intermediasi bank dan berjalan tidak optimal karena hal tersebut dapat menurunkan perputaran dana bank. Bahkan lebih jauh, NPF yang tinggi dapat menurunkan pendapatan margin di bank syariah (Dewi dan Setyowati, 2017).

Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan Langsung Dana Pihak Ketiga terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Riil

Pada umumnya DPK berperan sebagai dana yang digunakan bank dalam melakukan seluruh aktivitas pembiayaan, termasuk pembiayaan untuk mendanai aktivitas sektor riil, karena DPK adalah indikator ekonomi makro (Hasyim, 2016). Menurut Kishan & Opiela (2000) kenaikan pada simpanan dana di masyarakat (DPK) yang dikelola oleh sebuah bank dapat mendukung kemampuan bank dalam meningkatkan porsi pinjaman ke sektor usaha. Kemudian dilengkapi Rama (2013) menyatakan bahwa DPK yang dihimpun dari pihak yang kelebihan dana, kemudian akan menginvestasikan dananya ke lembaga keuangan, dan selanjutnya akan disalurkan ke sektor usaha. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi DPK yang dihimpun bank akan memperbesar dana untuk aktivitas sektor riil, yang salah satunya untuk mendanai sektor UMKM sebagai penyerap tenagakerja terbesar, sehingga penyerapan Tenaga Kerja Sektor Riil (TKSR) pun akan meningkat. Sehingga, hipotesis yang akan diuji adalah:

H1 : Dana Pihak Ketiga berpengaruh langsung terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Riil

2. Hubungan Langsung Non Performing Financing terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Riil

NPF mencerminkan risiko pembiayaan, sehingga semakin tinggi rasio NPF, menunjukkan kualitas pembiayaan pada bank syariah makin buruk, namun semakin tinggi NPF menunjukkan keadaan banyaknya pembiayaan yang tinggi yang sedang beredar di masyarakat (Aryani, 2016). Apabila pembiayaan sedang banyak tersalurkan maka penyerapan TKSR pun akan meningkat, karena penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh adanya investasi salah satunya dalam bentuk pembiayaan dari swasta (Adil, 2017). Hasil penelitian yang mendukung adalah menurut Purwidiyanti dan Hidayah (2014) yang membuktikan bahwa NPF berpengaruh terhadap sektor UMKM sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar. Kemudian dilengkapi oleh pendapat Tiarani (2018) yang mengatakan bahwa dampak dari pembiayaan bermasalah secara luas mencakup perekonomian negara. Maka, hipotesis yang diuji adalah:

H2 : Non Performing Financing berpengaruh langsung terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Riil

3. Hubungan Langsung Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Riil

Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan produktif yang dapat berperan sebagai kapital produktif yang mendukung jangka panjang pembangunan ekonomi dan keuangan, terutama *musharakah* dengan pembiayaan jangka panjang proyek-proyek produktif (Dar dan Presley, 2000). Pembiayaan bagi hasil tersebut dapat disalurkan ke sektor riil untuk membuka lapangan pekerjaan atau memperluas lapangan pekerjaan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor riil tersebut. Diperkuat oleh pendapat Rimadhani dan Erza (2011) yang menghasilkan bahwa untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam adalah tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Hasil penelitian Shaikh (2017) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* dapat digunakan untuk mendanai suatu usaha mikro, usaha mikro ini akan memperkerjakan masyarakat miskin yang memiliki keterampilan terkait, dengan hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa bank syariah dengan menyalurkan pembiayaan *mudharabah* akan membuka peluang kerja (memperluas lapangan pekerjaan) sehingga dapat tercipta penyerapan tenaga

kerja. Kemudian didukung oleh Rama (2013) yang menyimpulkan bahwa perbankan syariah diharapkan dapat tetap konsisten dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor riil dan UMKM melalui pola pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, karena pola pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* secara ekonomi sudah berkontribusi dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan, lalu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi riil. Maka, hipotesis yang diuji adalah:

H3 : Pembiayaan Bagi Hasil yang disalurkan ke sektor riil berpengaruh langsung terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Riil

4. Hubungan Dana Pihak Ketiga terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Riil melalui Pembiayaan Bagi Hasil

DPK merupakan faktor yang memengaruhi penyaluran Pembiayaan Bagi Hasil (PBH) ke sektor riil, menurut hasil penelitian Andraeny (2011) serta Donna & Chotimah (2008) menyimpulkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Penyaluran Pembiayaan Bagi Hasil (PBH) ke sektor riil yang dipengaruhi oleh DPK dapat memengaruhi penyerapan pada TKSR. Dapat disimpulkan beberapa teori memperkuat adanya pengaruh dari DPK terhadap penyaluran PBH, dan selanjutnya adanya pengaruh dari penyaluran PBH terhadap penyerapan TKSR. Sehingga pada penelitian ini akan meneliti pengaruh DPK sebagai faktor yang memengaruhi penyaluran PBH terhadap penyerapan TKSR yang merupakan variabel yang dipengaruhi oleh penyaluran PBH. Maka, hipotesis yang diuji adalah:

H4 : Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap penyerapan Tenaga Kerja Sektor Riil melalui Pembiayaan Bagi Hasil

5. Hubungan Non Performing Financing terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Riil melalui Pembiayaan Bagi Hasil

NPF merupakan salah satu faktor yang memengaruhi penyaluran pembiayaan bagi hasil karena, tingginya risiko gagal bayar menjadi permasalahan pada bank syariah, dan pembiayaan bagi hasil masih rendah karena risiko yang dihadapi lebih besar (Febianto, 2007). Hubungan NPF dan PBH adalah jumlah pembiayaan *mudharabah* akan menurun jika terjadi peningkatan jumlah

pembiayaan bermasalah atau NPF (Christie, 2007). Didukung oleh hasil penelitian Nurbiaty (2017) yang menyimpulkan bahwa NPF berpengaruh negatif, jika NPF naik, pembiayaan dengan sistem bagi hasil akan menurun. Dapat disimpulkan apabila adanya hubungan antara NPF dengan PBH, dimana NPF menjadi faktor yang berpengaruh terhadap besarnya penyaluran PBH, maka NPF akan memiliki pengaruh juga pada penyerapan TKSR yang dikarenakan adanya hubungan atau pengaruh dari PBH terhadap penyerapan TKSR. Maka, hipotesis yang diuji adalah:

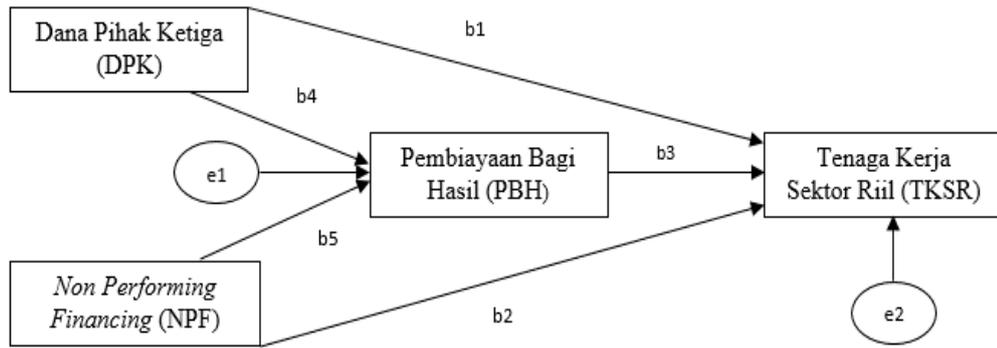
H5 : Non Performing Financing berpengaruh terhadap penyerapan Tenaga Kerja Sektor Riil melalui Pembiayaan Bagi Hasil

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif dan metode penelitiannya adalah analisis deskriptif. Populasinya adalah Bank Umum Syariah di Indonesia. Sampelnya adalah 8 Bank Umum Syariah di Indonesia. Dalam menentukan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling*, karena dalam menentukan sampel dengan pertimbangan bahwa sampel Bank Umum Syariah yang dipilih adalah bank yang memiliki laporan keuangan lengkap dengan data pembiayaan bagi4hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*). Teknik mengumpulkan data dilakukan dengan studidokumentasi atau mengambil data yang tersedia, Peneliti mengumpulkan data laporan keuangan Bank Umum Syariah dan data statistik Badan Pusat Statistik. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan bantuan software *WarpPLS*. Langkah analisis yang dipilih adalah analisis jalur, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan diagram jalur.

Berdasar variabel yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian ini, kemudian dibentuk model diagram jalur untuk memudahkan ilustrasi penelitian ini.



Gambar 1. Pengembangan Model Penelitian

Sumber: data diolah, 2019

2) Konversi diagram jalur ke dalam persamaan

Untuk mengetahui pola hubungan masing-masing variabel tersebut maka dapat disusun sistem persamaan strukturnya sebagai berikut:

- a) Pengaruh Dana Pihak Ketiga, dan *Non Performing Financing*, terhadap Pembiayaan Bagi Hasil yang disalurkan ke sektor riil dengan persamaan sebagai berikut:

$$PBH = \beta_4 DPK + \beta_5 NPF + e_1 \dots\dots\dots(1)$$

- b) Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* terhadap penyerapan Tenaga Kerja Sektor Riil melalui Pembiayaan Bagi Hasil yang disalurkan ke sektor riil melalui persamaan sebagai berikut:

$$TKSR = \beta_1 DPK + \beta_2 NPF + \beta_3 PBH + e_2 \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan :

- $TKSR$ = Penyerapan Tenaga Kerja Keseluruhan pada sektor riil
- PBH = Pembiayaan Bagi Hasil yang Disalurkan ke Sektor Riil
- DPK = Dana Pihak Ketiga
- NPF = *Non Performing Financing*
- b_1 = Koefisien Jalur Dana Pihak Ketiga dengan Tenaga Kerja Sektor Riil
- b_2 = Koefisien Jalur *Non Performing Financing* dengan Tenaga Kerja Sektor Riil
- b_3 = Koefisien Jalur Pembiayaan Bagi Hasil dengan Tenaga Kerja Sektor Riil
- b_4 = Koefisien Jalur Dana Pihak Ketiga dengan Tenaga Kerja Sektor Riil melalui Pembiayaan Bagi Hasil

b_5 = Koefisien Jalur *Non Performing Financing* dengan Tenaga Kerja Sektor Riil melalui Pembiayaan Bagi Hasil

e_1 dan e_2 = *error*

Hasil dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Setelah data terkumpul maka selanjutnya dilakukan uji statistik deskriptif untuk melihat sebaran data yang diperoleh. Berikut hasil pengujian yang telah dilakukan.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DPK	40	1015791	77903000	20745088,55	22422621,866
NPF	40	,0010	,1252	,042440	,0276322
PBH	40	277662,1825	22066320	67044225,516400	7219058,7531828
TKSR	40	116,366974	125,052700	119,56044300	2,940260200

Sumber: data diolah, 2019

Variabel DPK menunjukkan besarnya dana yang terhimpun dari nasabah berupa giro, tabungan, dan deposito. Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata DPK dari sampel Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2017 adalah sebesar Rp20.745.088,55 dengan standar deviasi sebesar 22.422.621,866. Nilai terkecil dari DPK diperoleh sebesar Rp1.015.791,00 yang dimiliki oleh Bank Victoria Syariah pada tahun 2013, sedangkan DPK terbesar adalah sebesar Rp77.903.000,00 yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri pada tahun 2017.

Variabel NPF menunjukkan besarnya pembiayaan bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet. Nilai rata-rata NPF dari sampel Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2017 adalah sebesar 0,042440 atau 4,2% dengan standar deviasi sebesar 0,0276322. Nilai terkecil dari NPF diperoleh sebesar 0,0010 atau 0,1% yang dimiliki oleh BCA Syariah pada tahun 2013 dan 2014, sedangkan NPF terbesar adalah sebesar 0,1252 atau 12,5% yang dimiliki oleh Bank Panin Syariah pada tahun 2017.

Variabel PBH menunjukkan besarnya jumlah pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang disalurkan ke sektor riil. Tabel 1 menunjukkan nilai rata-rata PBH dari sampel Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2017 adalah sebesar Rp6.704.225,52 dengan standar deviasi sebesar 7.219.058,75.

Nilai terkecil dari PBH diperoleh sebesar Rp277.662,18 yang dimiliki oleh Bank Victoria Syariah pada tahun 2013, sedangkan PBH terbesar adalah sebesar Rp22.066.320,36 yang dimiliki oleh Bank Muamalat pada tahun 2014.

Variabel TKSR menunjukkan besarnya jumlah keseluruhan penyerapan tenaga kerja pada sektor riil. Tabel 1 menunjukkan nilai rata-rata TKSR periode 2013-2017 adalah sebesar 119,56 juta, dengan standar deviasi sebesar 2,9. Nilai terkecil dari TKSR diperoleh sebesar 116,37 juta yang terjadi pada tahun 2013, dan TKSR terbesar adalah sebesar 125,053 juta yang terjadi pada tahun 2017.

Goodness of Fit Model

Uji kelayakan model yang digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual. Dalam *software WarpPLS* melihat model fit yaitu dengan melihat hasil nilai *Average Path Coefficient (APC)*, *Average R-squared (ARS)*, *Average Adjusted R-squared (AARS)*, *Average Block VIF (AVIF)*, *Average Full Collinearity VIF (AFVIF)*, *Tenenhaus GoF (GoF)*, *Sympson's Paradox Ratio (SPR)*, *R-Squared Contribution Ratio (RSCR)*, *Statistical Suppression Ratio (SSR)*, dan *Nonlinear Bivariate Causality Direction Ratio (NLBCDR)*.

Tabel 2. Hasil Pengujian Goodness of Fit Model

	Nilai	P value		Keterangan
Average path coefficient (APC)	0,299	P < 0,001	P < 0,05	Fit
Average R-square (ARS)	0,516	P < 0,001	P < 0,05	Fit
Average adjusted R-square (AARS)	0,477	P < 0,001	P < 0,05	Fit
Average block VIF (AVIF)	2,030		<= 5	Fit
Average full collinearity VIF (AFVIF)	4,783		<= 5	Fit
Tenenhaus GoF (GoF)	0,718		>= 0,36	Large
Sympson's paradox ratio (SPR)	0,800		>= 0,7	Fit
R-squared contribution ratio	0,999		>= 0,9	Fit

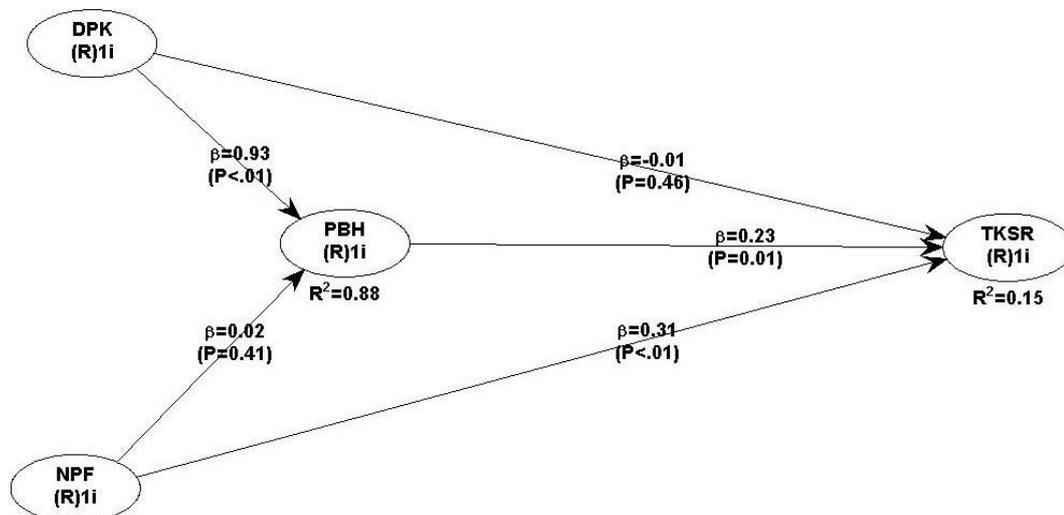
	Nilai	P value	Keterangan
(RSCR)			
Statistical suppression rasio (SSR)	1,000	$\geq 0,7$	Fit
Nonlinear bivariate causality direction rasio (NLBCDR)	1,000	$\geq 0,7$	Fit

Sumber: data diolah, 2019

Hasil output pengujian model di atas menunjukkan bahwa semua indeks fit, sehingga disimpulkan bahwa model penelitian pada penelitian ini dapat diterima, dan dapat melanjutkan tahapan berikutnya dalam pengujian analisis jalur pada penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Dasar pengambilan keputusan dalam uji hipotesis adalah bila *p-value* $\geq 0,05$ maka H_0 diterima dan jika *p-value* $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Di bawah ini adalah pengujian yang telah dilakukan.



Gambar 2. Hasil Pengujian Model

Sumber: data diolah, 2019

Keterangan:

DPK = Dana Pihak Ketiga

NPF = *Non Performing Financing*

PBH = Pembiayaan Bagi Hasil

TKSR = Tenaga Kerja Sektor Riil

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan tabel hasil pengujian pengaruh langsung dan tidak langsung dari gambar model di atas.

Tabel 3. Hasil Uji Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Variabel	β	P Value	Keterangan
Dana Pihak Ketiga	-0,01	= 0,46	Tidak signifikan
Non Performing Financing	0,31	< 0,01	Signifikan
Pembiayaan Bagi Hasil	0,23	= 0,01	Signifikan
Pengaruh langsung			
<i>Dependen variabel: Tenaga Kerja pada Sektor Riil</i>			
Dana Pihak Ketiga	0,215	= 0,002	Signifikan
Non Performing Financing	0,005	0,471	Tidak signifikan
Pengaruh tidak langsung			
<i>Intervening variabel: Pembiayaan Bagi Hasil</i>			
<i>Dependen variabel: Tenaga Kerja pada Sektor Riil</i>			

Sumber: data diolah, 2019

Pembahasan

Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Riil

Dalam tabel 3 dapat dilihat bahwa variabel DPK secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan Tenaga Kerja Sektor Riil (TKSR) dengan nilai p -value = 0,46 atau $> 0,05$ dan nilai koefisien beta yang negatif yaitu β -0,01. Angka tersebut menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan maupun penurunan sebesar satu satuan pada jumlah DPK adalah besarnya dana yang dihimpun dari masyarakat oleh bank syariah, secara langsung tidak berpengaruh terhadap banyaknya TKSR yang terserap. Hasil penelitian di atas dapat menghasilkan keputusan H_0 diterima atau H_1 tidak bisa didukung. Sehingga, hasil penelitian ini menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh secara langsung dari DPK terhadap penyerapan TKSR.

DPK secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan TKSR yang disebabkan oleh DPK yang berada pada bank bukan dana yang berada pada sektor produktif (sektor usaha). Sehingga DPK tidak memberikan kontribusi langsung terhadap penyerapan tenaga kerja sektor riil. DPK

berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor riil saat dana tersebut menjadi pembiayaan yang disalurkan ke sektor-sektor produktif. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Kishan & Opiela (2000) yang menyatakan bahwa agar dapat memperbesar kemampuan bank dalam meningkatkan porsi pinjaman ke sektor usaha diperlukan kenaikan simpanan dana masyarakat (DPK) yang dikelola sebuah bank. Bertentangan dengan pendapat Hasyim (2016) yang menyimpulkan bahwa DPK adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menggerakkan roda perekonomian secara menyeluruh. Dengan demikian hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak.

Pengaruh Non Performing Financing terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Riil

Dalam tabel 3 dapat dilihat bahwa variabel NPF secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan TKSR dengan nilai *p-value* < 0,01 dan nilai koefisien beta yang positif yaitu β 0,31. Angka tersebut menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan pada persentase NPF sebesar satu satuan, maka penyerapan TKSR akan ikut meningkat sebesar 0,31 dan begitu pula sebaliknya, setiap terjadi penurunan pada persentase NPF sebesar satu satuan, maka penyerapan TKSR akan menurun sebesar 0,31. Hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas dapat menghasilkan keputusan bahwa H_a2 diterima atau H_0 tidak dapat didukung. Sehingga, hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara langsung dari NPF terhadap penyerapan TKSR.

NPF secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan TKSR karena apabila NPF tinggi, itu menunjukkan keadaan pembiayaan yang tersalurkan kepada masyarakat pun banyak (Aryani, 2016). Dengan banyaknya pembiayaan yang sedang tersalurkan di masyarakat dapat menimbulkan risiko gagal bayar yang besar. Sehingga dengan kondisi seperti itu dapat memengaruhi peningkatan pada penyerapan TKSR. Besarnya pembiayaan yang tersalurkan kepada masyarakat akan mempengaruhi besarnya TKSR yang terserap. Penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh adanya investasi salah satunya dalam bentuk pembiayaan dari swasta (Adil, 2017). Penelitian ini mendukung Purwidiyanti dan Hidayah (2014) yang membuktikan bahwa NPF berpengaruh terhadap sektor UMKM. Kemudian dilengkapi oleh pendapat Tiarani (2018) yang mengatakan bahwa dampak dari pembiayaan bermasalah secara luas mencakup

perekonomian negara. Maka hipotesis 2 pada penelitian ini diterima dan dapat didukung oleh hasil penelitian.

Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Riil

Dalam tabel 3 dapat dilihat bahwa variabel PBH secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan TKSR dengan nilai *p-value* = 0,01 dan nilai koefisien beta yang positif yaitu β 0,23. Angka tersebut menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan pada penyaluran PBH sebesar satu satuan, maka penyerapan TKSR akan meningkat sebesar 0,23 dan begitu pula sebaliknya, setiap terjadi penurunan pada penyaluran Pembiayaan Bagi Hasil (PBH) sebesar satu satuan, maka penyerapan TKSR akan menurun sebesar 0,23. Hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas dapat menghasilkan keputusan bahwa H_{a3} diterima atau H_0 tidak dapat didukung. Sehingga, hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara langsung dari PBH terhadap penyerapan TKSR.

PBH yang disalurkan ke sektor riil memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan TKSR. PBH lebih menyentuh pada sektor riil, dan merupakan pembiayaan produktif yang dapat berperan sebagai modal produktif (modal kerja) yang dapat mendanai sektor riil. Dengan adanya pembiayaan produktif dapat membuka lapangan pekerjaan atau memperluas lapangan pekerjaan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor tersebut. Investasi di sektor riil akan meningkat, yang kemudian disertai oleh penciptaan lapangan kerja baru, sehingga berdampak positif pada tingkat pengangguran yang bisa dikurangi (Mujibatun, 2013). Hasil penelitian ini mendukung Shaikh (2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil berupa akad *mudharabah* dan *musyarakah* dapat dipakai untuk mendanai pembiayaan pada sektor riil dan UMKM, sehingga dapat membuka peluang kerja dan akan tercipta penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian secara ekonomi, pola pembiayaan bagi hasil tersebut telah berkontribusi mendorong pertumbuhan sektor ekonomi riil. Maka hipotesis3 pada penelitian ini di terima dan dapat didukung oleh hasil penelitian.

Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Riil melalui Pembiayaan Bagi Hasil

Dalam tabel 3 dapat dilihat variabel DPK secara tidak langsung atau melalui penyaluran PBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan TKSR dengan nilai $p\text{-value}=0,002$ dan, nilai koefisien beta positif yaitu β 0,215. Angka tersebut menunjukkan apabila ada peningkatan pada penghimpunan DPK yang disalurkan melalui PBH sebesar satu satuan, maka penyerapan TKSR akan meningkat sebesar 0,215. Begitu juga sebaliknya, setiap ada penurunan pada penghimpunan DPK yang disalurkan melalui PBH sebesar satu satuan, maka penyerapan TKSR akan menurun sebesar 0,215. Adanya pengaruh positif dan signifikan dari DPK secara tidak langsung atau melalui penyaluran PBH terhadap penyerapan TKSR, didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa DPK menjadi faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran PBH dengan nilai $p\text{-value}<0,01$ dan nilai koefisien beta positif yaitu β 0,93. Selanjutnya, didukung dengan adanya pengaruh langsung yang positif dan signifikan dari PBH terhadap TKSR dengan nilai $p\text{-value}=0,01$ dan nilai koefisien beta positif yaitu β 0,23. Hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas dapat menghasilkan keputusan bahwa H_{a4} diterima atau H_0 tidak dapat didukung. Sehingga, hasil penelitian ini menyatakan bahwa DPK secara tidak langsung atau melalui PBH berpengaruh terhadap penyerapan TKSR.

DPK secara tidak langsung atau melalui penyaluran PBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan TKSR karena besar kecilnya penyaluran PBH ke sektor riil yg akan berdampak terhadap penyerapan TKSR tergantung pada banyaknya DPK yang dihimpun bank syariah. Tanpa adanya dana, bank syariah tidak mampu untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dalam menyalurkan dana berbentuk pembiayaan. Kemampuan bank pada perluasan pembiayaan sangat bergantung pada kemampuan bank dalam memobilisasi DPK dari masyarakat. Mendukung hasil penelitian Andraeny (2011), Donna dan Chotimah (2008) menghasilkan kesimpulan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap PBH. Meningkatnya DPK yang dihimpun oleh bank bisa membuat bank lebih agresif pada penyaluran pembiayaan kepada sektor produktif (Susanty, 2014). Maka hipotesis 4 pada penelitian ini diterima dan dapat didukung oleh hasil penelitian.

Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Riil melalui Pembiayaan Bagi Hasil

Dalam tabel 3 dapat dilihat bahwa variabel NPF secara tidak langsung atau melalui penyaluran PBH tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan TKSR dengan nilai $p\text{-value} = 0,471$ atau $> 0,05$ dan nilai koefisien beta yang positif adalah $\beta 0,005$. Angka tersebut menunjukkan bahwa jika ada peningkatan maupun penurunan sebesar satu satuan pada persentase NPF yang adalah persentase PBH bermasalah, secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap banyaknya TKSR yang terserap. Tidak adanya pengaruh yang signifikan dari NPF secara tidak langsung atau melalui penyaluran PBH terhadap penyerapan TKSR, didukung dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa NPF tidak menjadi faktor yang memengaruhi penyaluran PBH, dengan nilai $p\text{-value}$ yang didapat yaitu sebesar $=0,41$ atau $> 0,05$ dan nilai koefisien beta yang positif yaitu $\beta 0,02$. Angka tersebut menunjukkan bahwa jika ada peningkatan pada persentase NPF sebesar satu satuan, maka penyaluran PBH tidak akan menurun dan begitu pula sebaliknya, setiap terjadi penurunan pada persentase NPF sebesar satu satuan, maka penyaluran PBH tidak akan meningkat. Hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas dapat menghasilkan keputusan bahwa H_0 diterima atau H_a5 tidak dapat didukung. Sehingga, hasil penelitian ini menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) secara tidak langsung atau melalui PBH tidak berpengaruh terhadap penyerapan TKSR.

NPF secara tidak langsung atau melalui penyaluran PBH tidak dapat berpengaruh signifikan terhadap penyerapan TKSR. Berdasarkan hasil penelitian ini, NPF tidak menjadi faktor yang memengaruhi jumlah penyaluran PBH. Sehingga besar kecilnya penyaluran PBH ke sektor riil yang akan berdampak pada penyerapan TKSR tidak tergantung pada besarnya rasio NPF. Hasil penelitian ini mendukung Andraeny (2011) yang menyatakan bahwa NPF tidak memengaruhi penyaluran pembiayaan bagi hasil. Kemudian hasil penelitian Akbar (2013) menyatakan bahwa NPF tidak memengaruhi porsi pembiayaan untuk UMKM yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia. Maka hipotesis 5 pada penelitian ini ditolak atau tidak dapat didukung oleh hasil penelitian.

Kesimpulan

Secara langsung Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap penyerapan Tenaga Kerja Sektor Riil (TKSR). Kemudian *Non Performing Financing* (NPF) dan Pembiayaan Bagi Hasil (PBH) secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan Tenaga Kerja Sektor Riil (TKSR). Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan Tenaga Kerja Sektor Riil (TKSR) melalui Pembiayaan Bagi Hasil (PBH), sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap penyerapan Tenaga Kerja Sektor Riil (TKSR) melalui Pembiayaan Bagi Hasil (PBH).

Berdasarkan kesimpulan yang didapat pada penelitian ini, penulis akan memberikan saran kepada perbankan syariah untuk mampu menghimpun dana semaksimal mungkin. Apabila penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada perbankansyariah tinggi, maka berpengaruh terhadap tingginya penyaluran pembiayaan bagi hasil ke sektor riil. Pembiayaan bagi hasil tersebut tertuju kepada sektor produktif yang dapat berperan sebagai kapital produktif, sehingga investasi pada sektor riil akan meningkat dan disertai dengan terciptanya kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan untuk menyerap tenaga kerja.

Apabila perbankan syariah dapat memaksimalkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran pembiayaan bagi hasil ke sektor riil, maka perbankan syariah dapat berperan untuk mengatasi salah satu permasalahan ekonomi di Indonesia yaitu pengangguran. Apabila permasalahan ekonomi tersebut teratasi maka akan berdampak menghilangkan kemiskinan dan menciptakan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adil. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan. *Skripsi UIN Alauddin Makassar*.
- Akbar, G. R. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Porsi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang Disalurkan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*.
- Andraeny, D. 2011. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Non Performing Financing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi

Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh*.

- Aryani, Y., Anggraeni, L., & Wiliasih, R. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2010-2014. *Jurnal Al-Muzara'ah IPB*.
- Burkett, I. 2012. Place-Based Impact Investment in Australia. *Literature Review: The Australian Government Department of Education Employment and Workplace Relations*.
- Cahyaningrum, I. S. 2017. Pengaruh Sektor Riil dan Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2007-2014. *E-Jurnal Institut Agama Islam Negeri Tulungagung*.
- Christie, A. 2007. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia. *Tesis Universitas Indonesia*.
- Dar, H., & Presley, J. 2000. Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking Management and Control Imbalances. *International Journal of Islamic Financial Services*, 1-9.
- Dewi, R. P., & Setyowati, D. H. 2017. Faktor Penentu Pendapatan Margin Istishna pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan*, vol. 13, no. 1, 31-40.
- Donna, D., & Chotimah. 2008. Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia Ditinjau dari Sisi Penawaran. *Jurnal Sosiosains*.
- Febianto, I., & Rahmatina. 2007. Why Do Islamic Banks Tend to Avoid Profit and Loss Sharing Arrangements? Proceeding of the 2nd Islamic Conference 2007 (iECON2007). *Faculty of Economics and Muamalat, Islamic Science University of Malaysia*.
- Fitri, M. 2016. Peran Dana Pihak Ketiga dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Economica*.
- Hasyim, L. T. (2016). Peran Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Riil di Indonesia . *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya*.
- Hijriyani, N. Z., & Setiawan, S. 2017. Analisis Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia sebagai Dampak Dari Efisiensi Operasional. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(2).
- Ihsan, D. N. 2013. Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah. *Jurnal UIN Jakarta Press*.
- Kishan, R., & Opiela, T. 2000. Bank Size, Bank Capital, and The Bank Lending Channel. *Journal of Money, Credit, and Banking*.

- Maidalena. 2014. Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) pada Industri Perbankan Syariah. *Human Falah*.
- Manap, A. 2018. *Pacu Pertumbuhan Sektor Penyerap Tenaga Kerja Terbesar*. Koran Jakarta.
- Mujibatun, S. 2013. Prospek Ekonomi Syariah Melalui Produk Mudharabah dalam Memperkuat Sektor Riil. *Jurnal Economica*.
- Nurbiaty, N. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Syariah Mandiri Indonesia Periode 2003-2015. *JOM Fekon*, 4(1), 783-797.
- Oktaviani, E. D. 2017. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Return On Assets (ROA) melalui Pembiayaan. *Jurnal Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.
- Purwidiyanti, W., & Hidayah, A. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Pembiayaan Perbankan Syariah Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian LPPM Universitas*, 75-80.
- Rama, A. 2013. Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Ridha, A. R. 2011. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usaha Percetakan Skala Kecil-Menengah di Kota Makassar. *Skripsi Fakultas Ekonomi UNHAS*.
- Rimadhani, M., & Erza, O. 2011. Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008–2011. *Jurnal Ekonomi Universitas Trisakti*.
- Setiawan, S. 2018. Determinan Penentu Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal MAPS (Manajemen dan Perbankan Syariah)*, 1(2), 1-9.
- Setyowati, D. H., Sartika, A., & Setiawan, S. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pangsa Pasar Industri Keuangan Syariah Non-Bank. *Jurnal Iqtisaduna*, 5(2), 169-186.
- Shaikh, S. 2017. Poverty Alleviation Through Financing Microenterprises with Equity Finance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 87-99.
- Soleh, A. 2017. Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*.

- Solow, R. M. 1956. A contribution to the theory of economic growth. *The quarterly journal of economics*, 70(1), 65–94.
- Suhartanto, D, Farhani, N. H., Muflih, M., & Setiawan. 2018. Loyalty intention towards Islamic Bank: The role of religiosity, image, and trust. *International Journal of Economics and Management*, 12, 137–151.
- Suhartanto, Dwi, Gan, C., Sarah, I. S., & Setiawan, S. 2019. Loyalty towards Islamic banking: service quality, emotional or religious driven? *Journal of Islamic Marketing*, 11(1), 66-80
- Supriyadi, A. 2003. Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah: Suatu Tinjauan Yuridis terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah). *Al-Mawarid*, Edisi X, 42-58.
- Susanty, W. D. 2014. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Sebagai Penentu Fungsi Intermediasi Perbankan. *Jurnal Fakultas Ekonomi Bisnis UB*.
- Swan, T. W. 1956. Economic growth and capital accumulation. *Economic record*, 32(2), 334–361.
- Tiarani, N. 2018. Problematika Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah dan Cara Mengatasinya.
- Utari, T., & Dewi, M. 2014. Pengaruh Modal, Tingkat Pendidikan dan teknologi Terhadap UMKM di Kawasan Imam Bonjol Denpasar Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*, Vol. 3, No. 12.
- Yusoff, R., & Wilson, R. 2005. An Economic Analysis of Conventional and Islamic Bank Deposits in Malaysia. *Review of Islamic Economics*, 31-52.